



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 125/BUA.4/PL1.2/III/2026 Jakarta, 9 Maret 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian dan Tindak Lanjut Berita Acara Kesepakatan
Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum

Yth. Pimpinan dan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (satuan kerja terlampir)

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan Penggunaan dan Pencatatan Ganda Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor 759/BUA.4/PL1.2/XII/2025 tanggal SEK.4-PB.03.03-2685 tanggal 31 Desember 2025 (terlampir), dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat temuan pemeriksaan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 pada Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa terdapat aset Kementerian Hukum dan HAM yang beririsan dengan Mahkamah Agung. Hal ini berimplikasi pada pencatatan dan penggunaan BMN pada satuan kerja terkait di bawah Mahkamah Agung, yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, Kementerian Hukum dan Mahkamah Agung telah melakukan pembahasan dan koordinasi serta audiensi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, yang menghasilkan kesepakatan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan sebagaimana pelaksanaan tersebut telah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara.
3. Satuan kerja terkait diminta melaksanakan langkah-langkah penyelesaian yang telah diatur di dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut sesuai dengan permasalahan masing-masing dan berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan Mahkamah Agung, khususnya Bagian Administrasi Penghapusan (untuk masalah penggunaan bersama dan alih status) dan Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara (untuk masalah penatausahaan/pencatatannya pada aplikasi SAKTI).
4. Pelaksanaan Koreksi Pencatatan BMN terkait pada Aplikasi SAKTI harus dilaksanakan paling lambat sebelum pencatatan transaksi BMN untuk periode 14 tahun 2025 ditutup.

5. Satuan Kerja diminta mengungkapkan progres pelaksanaan Berita Acara Kesepakatan ini pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) *Audited* tahun 2025.
6. Satuan kerja diminta melaporkan hasil pelaksanaan Berita Acara Kesepakatan tersebut setelah selesai (tuntas) dilaksanakan beserta data dukung terkait kepada Kepala Badan Urusan Administrasi c.q. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan



Ditandatangani secara elektronik
Rosyidatus Syarifeini

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro BMN Kementerian Hukum RI;



LAMPIRAN

Surat Dinas Kepala Biro Perlengkapan BUA MA RI

Nomor : 125/BUA.4/PL1.2/III/2026

Tanggal : 09 Maret 2026

Daftar Satuan Kerja

1. Pengadilan Negeri Denpasar
2. Pengadilan Negeri Tangerang
3. Pengadilan Negeri Semarang
4. Pengadilan Negeri Surabaya
5. Pengadilan Tinggi Surabaya
6. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
7. Pengadilan Tinggi Ambon
8. Pengadilan Negeri Balige
9. Pengadilan Negeri Tarutung
10. Pengadilan Negeri Waikabubak
11. Pengadilan Tinggi Pontianak